

**ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BATU
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
(Studi Pada Pilpres 2019 di Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Pernyataan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Disusun Oleh:

ADITYA PETEN SILI

NIM. 2018210027

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2021

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dan salah satu perubahan yang paling menonjol sejak diterapkannya sistem demokrasi Pancasila pada era reformasi ini adalah pemilihan umum yang lebih demokratis. Untuk menyelenggarakan pemilu yang baik, pemerintah akan membentuk Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan komisi pemilu yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Salah satu elemen kunci dari pemilihan umum adalah pemilihan yang berlangsung dengan baik, adil dan jujur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup peran KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilpres 2019 dan untuk mengetahui peran KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tahun 2019. Hal tersebut untuk menemukan faktor yang bisa memberi. Pemilu Presiden.

Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik menentukan informan yaitu *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam analisis data, penulis menggunakan *reduction data*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah melalui kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto. Untuk menguji kredibilitas tingkat kepercayaan data maka peneliti menggunakan triangulasi yaitu menggambarkan antara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitian menunjukkan Peran Kpu Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres 2019 adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pemilu, mendirikan rumah pintar pemilu, menjalin kerjasama dengan pemerintah melalui kesbangpol, dan menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat agar mensosialisasikan pemilu serentak agar berjalan dengan baik sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan secara nasional. Faktor pendukung Peran Kpu Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres 2019 adalah Kerjasama antara Kpu Kota Batu dengan Pemerintah Kota melalui Kesbangpol dalam mensosialisasikan pemilu untuk mensukseskan pemilu 2019 di Kota Batu, bantuan dari peserta pemilu sebanyak 55 orang, dan bantuan dari masyarakat Kota Batu, seperti komunitas masyarakat, organisasi masyarakat. Faktor penghambat Peran Kpu Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres 2019 adalah Kurangnya anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia, terlambatnya regulasi yang diberikan oleh KPU Pusat.

Kata Kunci: Peran Kpu, Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem demokrasi. Indonesia menggunakan sistem demokrasi mulai pada tahun 1945 sejak undang-undang dasar 1945 diberlakukan. Sejak menggunakan sistem demokrasi, Indonesia sudah melakukan perubahan sistem demokrasi sebanyak tiga kali dari demokrasi parlementer (liberal), demokrasi terpimpin hingga demokrasi pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasari oleh konsep berpikir yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi kita akan mengenal tiga pemisah kekuasaan yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif atau sering disebut konsep '*trias politica*'.

Sejak menggunakan sistem demokrasi pancasila di era reformasi perubahan yang menonjol adalah pemilihan umum yang lebih demokratis. Untuk menghadirkan pemilihan umum yang baik pemerintah membentuk banwaslu sebagai banwaslu dan KPU yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu. Salah satu faktor penting dalam pemilihan umum adalah Suatu pemilihan yang berjalan secara baik dan adil serta kejujuran. Dalam perjalanannya KPU sudah melakukan perubahan sebanyak empat kali agar menciptakan KPU yang integritas. Selanjutnya sebagai anggota KPU harus punya integritas moral, karena KPU adalah motor penggerak. Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 (1) Suatu pemilihan umum

dilakukan secara langsung oleh masyarakat sebagai wujud apresiasi dan arti penting dalam perwujudan kerakyatan yang berdaulat dan menjalankan pemerintahan yang demokratis. Proses pemilihan orang dapatkan jabatan adalah pemilu. Dan jabatan yang diisi adalah kepala negara dan legislative sampai Kades. Agenda yang paling penting harus dijalankan dan sebagai proses dari demokrasi adalah pemilihan umum. Komisi pemilihan umum menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan undang – undang. Tanpa adanya sosialisasi pada relawan, KPU tidak mungkin berfungsi secara maksimal tanpa dukungan sumber daya manusianya. Pemilu dilaksanakan secara langsung, adil dan jujur jika mempunyai integritas dan menghormati hak – hak sipil KPU (2009) bahwa petunjuk penyelenggaraan Suatu pemungutan suara perhitungan suara di daerah pemilihan dalam pemilu serta kebijakan warga negara dan kinerja KPU seringkali jadi perbincangan.

Wilayah kerja lembaga Komisi Pemilihan Umum meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu, tugas dan wewenang KPU tidak dibatasi oleh apapun, sebagaimana diatur oleh Komisi Independen Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peran KPU semakin mengakar, karena ada hubungan hirarkis antara KPU pusat dan KPU daerah dengan KPU kota atau kabupaten, dan sekretaris membantu dalam melaksanakan kegiatan KPU dan memanfaatkan bantuan sekretaris.

Agenda politik pilkada ini sendiri adalah pemilihan wakil rakyat yang membawa isi hati nuraninya untuk melanjutkan perjuangan pemeliharaan dan pembangunan kemerdekaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ia mempertimbangkan kebutuhan rakyat, mendahulukan kepentingan individu di atas

kepentingan rakyat, dan memastikan bahwa pemerintah memiliki keyakinan penuh atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik di masa depan. UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa: Direktur daerah dan wakil direktur daerah dipilih dari pasangan calon yang dipilih secara demokratis dengan prinsip kejujuran dan keadilan.

Asas- asas dalam pokok – pokok pemilihan kepala daerah menjamin bahwa suara para pemilih setelah tahapan pemilu tidak terungkap dan dijamin oleh pemerintah. Prinsipnya, partisipasi politik warga pada pemilu sarana bagi kota madya untuk kontrol arah pemerintahan yang dipilih. Masyarakat punya hak untuk menentukan siapa yang harus dipilih sesuai dengan hati Nurani mereka menyerahkan amanah pada pihak yang layak serta dipercaya dalam menjalankan kebijakan pemerintah kedepannya, adanya partisipasi politik juga sebagai instrument agar ekspresikan keadaan individu Suatu kelompok sosial agar pengaruh pemerintah sesuai mekanisme politik. Kegiatan setiap individu atau warga negara dan pengaruh pemerintah di dalam suatu perumusan kebijakan adalah partisipasi politik, di dalam negara demokrasi partisipasi politik memang sangat penting karena memiliki indikator Suatu kekuasaan tertinggi yang sah oleh kedaulatan rakyat dan diwujudkan di dalam menjalankan tugas KPU dengan tingkatan partisipasi politik masyarakat kota Batu dalam memilih, KPUD Kota Batu telah menjalankan tugas secara maksimal dan melindungi hak pilih sebagai masyarakat, namun tingkat partisipasi politik tahun 2008 di agenda pilkada gagal mencapai target sebesar 77,5 %, selanjutnya perolehan suara di Kota Batu pada tahun 2008 sekitar 70,1 %, target yang tidak tercapai adalah 29,86 %.

Selain itu, Pilgub 2013 gagal meningkatkan aktivitas pemungutan suara di Kota Batu. Akibat pengulangan tersebut, tingkat partisipasi politik masyarakat turun 69,32%, dan kejadian golput meningkat 30,68%. Daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 9 Juli 2014 sebanyak 147.085 pemilih, sedangkan di Kota Batu 121.984 pemilih menggunakan hak pilihnya. Dilihat dari jumlah suara, ada 120.034 suara sah dan 1.950 suara tidak sah. Akibat rendahnya tingkat partisipasi politik dari masyarakat dan sikap kelompok yang golput di mana timbul sikap apatis pada aktivitas politik dimana rakyat lebih memilih melakukan aktivitas sehari – hari dengan bekerja, olahraga dan kegiatan sosial lainnya. Menyelenggarakan pemilihan dan/atau sosialisasi terkait tugas dan wewenang KPU kota/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 18(J), dengan pasal tersebut maka Kpu Kota/Kabupaten wajib mensosialisasikan tentang pemilu agar masyarakat mengetahui pentingnya pemilu sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang terselenggaranya pemilu legislatif ditetapkan bahwa untuk tingkatan pemilu legislatif menjamin terselenggaranya hak masyarakat dalam berpolitik, Suatu penyelenggaraan pemilihan yang profesional yang memiliki integritas dan keterampilan serta membutuhkan akuntabilitas yang tinggi dari KPU untuk masyarakat. Sehingga dengan adanya penyelenggaraan yang profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dapat tercapai partisipasi politik masyarakat untuk membantu terselenggaranya pemilu yang bersih, adil, jujur sesuai dengan semangat demokrasi kearifan lokal dari bangsa Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Kota Batu**

Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres 2019”, studi pada Pilpres 2019 di kantor KPUD Kota Batu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran KPUD Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk mensukseskan pilpres di tahun 2019?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja KPUD Kota Batu dalam Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilpres 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran KPUD Kota Batu dalam Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilpres 2019.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja KPUD Kota Batu dalam Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilpres 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Manfaat Akademis

untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan untuk mendukung peneliti dan pemangku kepentingan lainnya yang tertarik pada bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kota Batu agar dapat meningkatkan kekompakan lagi dan komunikasi serta strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Batu dalam menghadapi pemilu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustino Leo, 2009. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Almond, 1956. *Studi Perbandingan sistem politik*. Yogyakarta, University Gajamada Pres.

Amir Hamzah, 2020. *Penelitian Kepustakaan*. Malang, Literasi Nusantara Abadi

Giddens, 2010. *Dasar – Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Giddens, Anthony, 1979, *Masalah utama dalam Teori Sosial*: London, Macmillan

Giddens, Anthony, 1985, *Kritik Kontemporer terhadap Materialisme Sejarah*. Jil. 2. *Negara Bangsa dan Kekerasan*. Cambridge : Polity

Huntington & Nelson, 1990. *Partisipasi Politik Negara*. Jakarta, Rineka

Manik, Husni K, 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilu*. Jakarta: KPU RI.

Milbrath, Lester. 1965. *Partisipasi Politik*, Chicago: Rand McNally company

Miriam Budiharjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Partisipasi Politik Merupakan Kegiatan Seseorang Dalam Partai Politik*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama

Miriam Budiharjo, 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama.

Mohtar Masoed dan Collin Andrews, 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta University Gajamada Pres

- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rafael Raga Maran, 2007, *Pengantar Logika*, Jakarta Grasindo.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, dalam, Hamzah, 2020. *Menjelaskan Klasifikasi Berdasarkan Level Penjelasannya Yakni Deskriptif, Komparatif Dan Asosiatif*. Jakarta, CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono.2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Udiarjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 *Tentang Pemilihan Umum*

UU No. 7 tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan (*Pemilihan Umum Menyebutkan Bahwa Untuk Meningkatkan Kualitas Pemilihan Umum Yang Dapat Menjamin Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat*)

UU No. 10 Tahun 2016, Tentang Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Pilih Dalam Satu Pasangan Calon Yang Dilaksanakan Secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Dan Adil.

Peraturan *Komisi Pemilihan Umum* Nomor 10 Tahun 2018 Tentang (Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu*)

Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015, Tentang (Sosialisasi Dan *Partisipasi Masyarakat* Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota)

Perturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang (Pembentukan *Komisi Pemilihan Umum* Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum *Komisi Pemilihan Umum*)

SKRIPSI

Bahari Samsul, 2013. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Putaran Ke Dua di Kota Pekanbaru Baru*. Universitas Riau.

Tahir, Diki Kurniawan, 2017. Strategi Komunikasi *KPU* dalam *Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Bupati Konawe Selatan tahun 2015*, Sulawesi Selatan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.